

PENDAHULUAN

Implementasi diartikan sebagai proses penerapan atau pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi proses dari keberlanjutan perumusan masalah, mulai dari masalah dirumuskan, diidentifikasi, sampai dilaksanaka. Sehingga implementasi kebijakan publik merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Menurut Situmorang Chazi, 2016 (dalam permatasari, 2020) Pada dasarnya implementasi kebijakan menjadi variabel krusial dengan pengaruh besar dalam penyelesaian setiap masalah publik. Salah satu permasalahan serius yang menjadi fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah *stunting*. Sebagaimana disebutkan dalam WHO, bahwa *stunting* merupakan dampak dari kekurangan gizi kronis pada balita sehingga mejadi lebih pendek dari usiannya, hal ini terjadi dari awal pembentukan janin sampai terlihat pada anak yang berusia dua tahun (Febrian & Yusran, 2021). *Stunting* tidak hanya pendek, namun dapat memberikan informasi bahwa adanya gangguan pertumbuhan linear dalam jangka waktu lama dengan hitungan tahun (Patimah, 2021).

Secara luas masalah *stunting* dapat menjadi indikator untuk mengukur status gizi masyarakat, apabila prevlensi balita *stunting* disuatu wilayah tinggi, maka dapat dipastikan bahwa wilayah tersebut mengalami masalah pembangunan berkelanjutan secara umum. Karena *stunting* berkaitan dengan gagal tumbuh kembang pada anak, dimana masalah ini dapat mempengaruhi masa depan anak bangsa dengan cara yang signifikan, yaitu dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, diantaranya perkembangan otak yang melambat, keterbelakangan mental, dan kurangnya kemampuan akan sulit belajar, dan juga dikhawatirkan akan munculnya penyakit-penyakit kronis (Syarli & Gusman, 2022). Artinya jika tidak segera diatasi maka berpotensi menyebabkan permasalahan yang membahayakan untuk keberlanjutan pertumbuhan anak bangsa. Pada akhirnya secara umum *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan (Nursyifa & Halim, 2025).

Dalam hal ini, regulasi atau kebijakan yang mengatur penanggulangan penurunan *stunting* di Indonesia, seperti pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Upaya mewujudkan target tersebut, pemerintah memiliki peran sebagai pengarah, regulator, dan pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa *stunting* merupakan masalah yang signifikan di Indonesia dan perlu segera ditangani saat ini (Bappenas, 2021). Selain itu adanya implementasi kebijakan dan anggaran untuk penanggulangan *stunting* yang dapat mengurangi masalah gizi buruk dan diharapkan dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih tinggi (dalam Haryono, Marlina 2021). Sehingga diperlukan penanganan yang segera dan berkelanjutan yaitu dengan melaksanakan kerjasama bersama seluruh elemen baik dari pemerintah, swasta sampai masyarakat dalam menurunkan angka *stunting* (dalam Sitohang & Lestari, 2024).

Sebagaimana implementasi kebijakan pastinya memerlukan kerjasama antar aktor dan organisasi untuk memastikan tujuan tercapai, sumber daya tersedia, dan konflik dikelola menurut (Campos & Reich, 2019) dalam Larasati & Raharj, 2024). Pada kasus *stunting* di Jawa Tengah yang bervariasi menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap penanggulangan *stunting* melalui peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah No. 43 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sehingga dengan adanya dinas kesehatan yang bertanggungjawab membantu gubernur untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan, termasuk kebijakan, pelayanan, dan pencegahan penyakit (Pergub Jateng No.43, 2021 dalam Larasati & Raharjo 2024). Berikut merupakan data kasus *stunting* di provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2024 yang tersebar di 36 Kabupaten/Kota.

Tabel 1.1 Data Kasus Balita *Stunting* di Jawa Tengah Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Tegal	16.619
2	Banyumas	14.274
3	Brebes	11.978
4	Magelang	10.280

5	Banjarnegara	10.258
6	Klaten	8.350
7	Pemalang	8.070
8	Wonosobo	7.850
9	Kebumen	7.503
10	Purbalingga	7.332
11	Grobogan	6.728
12	Kendal	6.663
14	Boyolali	6.438
15	Temanggung	5.811
16	Purworejo	5.646
17	Pati	5.487
18	Sragen	5.439
19	Cilacap	5.303
20	Rembang	4.775
21	Wonogiri	4.447
22	Batang	4.246
23	Pekalongan	4.017
24	Sukoharjo	3.618
25	Jepara	2.887
26	Blora	2.824
27	Karanganyar	2.732
28	Kudus	2.373
29	Demak	2.130
30	Semarang	2.116
31	Kota Surakarta	1.522
32	Kota Pekalongan	1.290
33	Kota Semarang	1.206
34	Kota Tegal	1.015
35	Kota Salatiga	543
36	Kota Magelang	515

Sumber: Bappedalitbag Kab.Banyumas. Data Olah Penulis

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 10 Kabupaten dengan jumlah balita *stunting* terbanyak di Jawa Tengah, beberapa diantaranya di Kabupaten Tegal sebanyak 16.169, Kabupaten Banyumas 14.274, Kabupaten Brebes 11.978, Kabupaten Magelang 10.280, Kabupaten Banjarnegara 10.258, Kabupaten Klaten 8.350, Kabupaten Pemalang 8.070, Kabuapten Wonosobo 7.850, Kabupaten Kebumen 7.503, dan di Kabupaten Purbalingga 7.332. Sesuai dengan data balita *stunting* di Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2024 tersebut, Kabupaten Banyumas menduduki urutan ke-2 dari 10 Kabupaten dengan

jumlah balita *stunting* terbanyak setelah Kabupaten Tegal. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka *stunting* di Kabupaten Banyumas masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten /Kota lain yang ada di Jawa Tengah.

Adapun regulasi yang dikeluarkan salah satunya berupa peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) mengenai Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Kabupaten Banyumas Tahun 2020-2023. RAD *stunting* tersebut merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk menurunkan angka *stunting* dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2020-2023 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program kegiatan. Upaya tersebut dicanangkan untuk memastikan bahwa seluruh pihak baik pemerintah dan non pemerintah dapat berkontribusi dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Banyumas. Berikut adalah tabel data kasus balita *stunting* Per Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Tabel 1. 2 Data Kasus *Stunting* Per Kecamatan di Kabupaten Banyumas

No.	Kecamatan	Balita		Jumlah	Presentase (%)
		Pendek	Sangat Pendek		
1.	Cilongok	261	1.288	1.549	20,48%
2.	Sumbang	211	669	880	13,81%
3.	Kembaran	103	617	720	16,98%
4.	Ajibarang	139	580	719	12,29%
5.	Jatilawang	107	585	692	19,30%
6.	Kebasen	94	589	683	16,54%
7.	Pekuncen	122	491	625	16,34%
8.	Kalibagor	121	478	599	17,47%
9.	Kedungbanteng	94	503	596	15,72%
10.	Sumpiuh	103	485	588	18,40%
11.	Sokaraja	109	466	575	10,98%
12.	Patikraja	79	478	557	15,54%
13.	PurwokertoSelatan	122	431	553	15,87%
14.	Tambak	89	448	537	18,68%
15.	Banyumas	72	463	535	17,13%

16.	Kemranjen	87	404	491	11,45%
17.	Baturaden	67	384	451	15,18%
18.	Wangon	92	337	429	9,21%
19.	Karanglewas	104	283	387	10,30%
20.	Gumelar	52	310	362	13,74%
21.	Rawalo	81	254	335	11,64%
22.	Lumbir	67	251	318	13,14%
23.	Purwojati	45	244	289	13,03%
24.	Purwokerto Timur	60	218	278	13,34%
25.	Purwokerto Barat	31	180	211	9,91%
26.	Purwokerto Utara	28	145	173	8,89%
27.	Somagede	32	110	142	7,04%

Sumber: Data Olah Penulis (Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas)

Berdasarkan dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat total sebanyak 14.274 untuk jumlah balita yang mengalami *stunting* di Kabupaten Banyumas, yang tersebar di 27 Kecamatan. Jumlah tertinggi berada di Kecamatan Cilongkok yaitu diangka 1.549 anak, kemudian disusul oleh Sumbang sebanyak 880 anak, Kembaran 720 anak, Ajibarang 719 anak, Jatilawang 692 anak, Kebasen 683 anak, Pekuncen 625 anak, Kalibagor 599 anak, Kedungbanteng 596 anak, Sumpiuh 588 anak, Sokaraja 575 anak, Patikraja 557 anak, Purwokerto Selatan 553 anak, Tambak 537 anak, Banyumas 535 anak, Kemranjen 591 anak, Baturaden 451, Wangon 429 anak, Karanglewas 387 anak, Gumelar 362 anak, Rawalo 355 anak, Lumbir 318 anak, Purwojati 289 anak, Purwokerto Timur 287 anak, Purwokerto Barat 211 anak, Purwokerto Utara 173 anak, dan Kecamatan dengan jumlah *stunting* paling sedikit adalah kecamatan Somagede yaitu sebanyak 142 anak.

Diantara 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas tersebut, Kecamatan Karangewas merupakan salah satu Kecamatan yang melaksanakan kegiatan mini loka karya dengan topik pembahasan Penanganan Percepatan Penurunan *Stunting* yang dalam hal ini merupakan kegiatan lintas sektoral. Sebagaimana dalam mensukseskan kebijakan maka sangat membutuhkan koordinasi lintas sektoral guna keberhasilan pencapaian tujuan bersama (Syamsuadi et al. (2020) dalam Syamsuadi et al. 2023). Adapun peserta yang hadir bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPINCAM) yang terdiri dari Dinas Pendidikan

Kabupaten Banyumas, Bappedalitbag, Kasi Permas Kecamatan Karanglewas, Ketua TP PKK Kecamatan, Faskes Pendamping RS. Hermina Purwokerto dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Karanglewas. Dari data kunjungan TPK, diketahui sasaran beresiko di Kecamatan Karanglewas terdiri dari 11 orang bayi dua tahun (Baduta) dan 131 orang ibu hamil (Bumil). Sehingga diharapkan adanya dukungan dan peran serta dari lintas sektoral (linsek) dalam pelaksanaan program penanggulangan *stunting* yang ada di wilayah Kecamatan Karanglewas yang terdiri dari 13 Desa. Berikut data kasus balita *stunting* berdasarkan Desa di Karanglewas.

Tabel 1.3 Data kasus *stunting* berdasarkan Desa di Kecamatan Karanglewas Tahun 2024

No.	Nama Desa	<i>Stunting</i>	Presentase
1.	Babakan	46	14,1%
2.	Karanggude Kulon	43	11,8%
3.	Sunyalangu	43	12,5%
4.	Jipang	37	3,3%
5.	Singasari	33	14,5%
6.	Pangebatan	32	8,9%
7.	Pasir Lor	29	12,2%
8.	Pasir Kulon	26	11,8%
9.	Karangkemri	24	10,2%
10.	Tamansari	21	5,5%
11.	Pasir Wetan	20	9,9%
12.	Karanglewas Kidul	19	6,0%
13.	Kediri	14	5,3%

Sumber: Data Olah Penulis (Bappedalitbag Kab.Banyumas)

Berdasarkan tabel dari laporan hasil pengukuran kasus balita *stunting* diatas menunjukan bahwa di Kecamatan Karanglewas terdapat 13 Desa dengan angka *stunting* paling tinggi adalah di Desa Babakan yaitu sebanyak 46 anak, dan dengan jumlah terendah berada di Desa Kediri sebanyak 14 anak. Selain itu Desa Babakan juga menjadi wilayah Desa dengan presentase *stunting* tertinggi ke-1 di antara 13 Desa di Kecamatan Karanglewas tersebut.

Sesuai dengan masalah tersebut, tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan dalam penanggulangan *stunting* di Desa Babakan. Meskipun sejumlah regulasi dan kebijakan telah dicanangkan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, namun realitanya jumlah balita *stunting* di Desa Babakan masih menunjukkan jumlah *stunting* paling tinggi di antara 13 Desa yang ada di Kecamatan Karanglewas. Permasalahan ini sudah tentu menambah urgensi bagi pemerintah untuk dapat memberikan perhatian khusus pada desa-desa lokus *stunting*, seperti Desa Babakan yang diharapkan untuk mampu meningkatkan aksi nyata dan memberikan terobosan yang tepat sebagai upaya untuk menekan angka *stunting* di Desa Babakan. Pemerintah bersama masyarakat sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam objek implementasi kebijakan *stunting* dan juga memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan *stunting* di wilayahnya sendiri. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif dan berkelanjutan di Desa Babakan.

Oleh karena itu, maka penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan penanggulangan *stunting* di Desa Babakan. Sebagaimana pelaksanaan kebijakan adalah kelanjutan dari proses perumusan dan penerapan kebijakan dan juga sebagai upaya yang terfokus pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Harahap, (2020) dalam Syahrizal et al., 2023). Implementasi kebijakan juga merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan yang diterapkan. Melalui beberapa dukungan kebijakan atau regulasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dan juga dasar hukum untuk acuan dalam bertindak dan sebagai aspek perlindungan yang kuat, baik bagi penyelenggaraan negara maupun bagi masyarakat. Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan *Stunting* di Desa Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas”**.